

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Unit Analisis, Populasi, dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2021) unit analisis atau objek penelitian merupakan suatu atribut dari orang, objek, maupun kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan. Unit analisis atau objek penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaporan dengan baik, laporan keuangan yang disusun dapat peneliti peroleh dengan mudah pada *website* sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang akan digunakan selama proses penelitian.

Populasi adalah keseluruhan data variabel penelitian dari berbagai aspek yang akan diteliti (Ahyar et al., 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah data pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022. Adapun sampel menurut Ahyar et al. (2020) merupakan bagian dari populasi yang berpacu pada teknik pengambilan sampel. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022.

B. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono (2021) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen. Adapun alasan

peneliti memilih data sekunder karena dapat dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan diperoleh dari *website* resmi Pemerintah Kota Tangerang ppid.tangerangkota.go.id.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan beberapa catatan serta format khusus sebagai instrumennya. Nilamsari (2014) menyatakan bahwa studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen, berupa dokumen tertulis, gambar, maupun dalam bentuk elektronik. Dokumen yang diperoleh tidak hanya dikumpulkan atau ditulis dalam bentuk kutipan tetapi kemudian dilakukan analisis membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 – 2022.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dapat didefinisikan sebagai rincian atas indikator pengukuran yang diteliti dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam mengukur setiap variabel (Sugiyono, 2021). Berikut merupakan indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Rasio Keuangan Daerah

Peneliti menggunakan lima rasio yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh kegiatan yang meliputi pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat yang diperoleh dari sumber daerahnya sendiri. Semakin tinggi rasio kemandirian dapat diartikan dengan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Berikut merupakan rumus rasio kemandirian keuangan daerah :

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Pola Hubungan, Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	< 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Purba (2012) dalam Sijabat et al. (2014)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jika rasio kemandirian keuangan daerah mencapai antara 75%-100% maka pola hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dikatakan tergolong kedalam pola delegatif, yaitu pemerintah daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan pemerintahannya sehingga sudah tidak ada campur tangan pemerintah pusat.

b. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan rasio yang menggambarkan besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, sehingga semakin tinggi kontribusi PAD yang diperoleh Pemerintah daerah mengandung arti bahwa kemampuan Pemerintah daerah atas penyelenggaraan desentralisasi fiskal juga semakin tinggi. Berikut ini merupakan rumus rasio derajat desentralisasi:

$$\text{Rasio DD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan keuangan daerah atas rasio derajat desentralisasi dapat diukur dengan menggunakan skala interval pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)
Sangat Kurang	< 10%
Kurang	10% - 20%
Cukup	20% - 30%
Sedang	30% - 40%
Baik	40% - 50%
Sangat Baik	> 50%

Sumber : Pasaribu et al. (2021)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jika rasio desentralisasi fiskal mencapai di atas 50% maka kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal dapat dikatakan sudah sangat baik.

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam melaksanakan PAD sesuai dengan target yang dianggarkan. Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah sejalan dengan semakin tingginya kemampuan Pemerintah daerah dalam mencapai anggaran penerimaan PAD. Berikut ini rumus yang dapat digunakan dalam menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Mahmudi (2019) menyebutkan bahwa, rasio efektivitas dapat diukur melalui perbandingan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Efektivitas PAD

Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif	< 75%
Kurang Efektif	75% - 89%
Cukup Efektif	90% - 99%
Efektif	100%
Sangat Efektif	> 100%

Sumber : Mahmudi (2019)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jika rasio efektivitas PAD mencapai di atas 100% maka pemerintah daerah tergolong sangat efektif dalam mencapai target/anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar produktivitas atas hasil kerja tertentu dengan menggunakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil rasio efisiensi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD, begitupun sebaliknya. Perhitungan rasio efisiensi PAD dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100$$

Adapun kriteria untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	> 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber : Mahmudi (2019)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jika rasio efisiensi PAD mencapai di bawah 10% maka biaya yang dikeluarkan dalam memungut PAD teralokasi secara efisien. Namun, jika rasio mencapai di atas 40% mengartikan bahwa pemerintah terlalu besar dalam mengalokasikan biaya untuk memungut PAD tersebut.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kenaikan atau penurunan selama tahun anggaran tertentu. Patarai (2016) menyebutkan bahwa rasio ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam atas tingkat pertumbuhan suatu daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan pendapatan ini diharapkan dapat melebihi laju inflasi, agar kinerja keuangan dapat terlaksana dengan baik. Semakin tinggi rasio pertumbuhan, maka semakin besar kemampuan pemerintah dalam meningkatkan serta mempertahankan keberhasilan yang dicapai dari setiap tahun. Perhitungan rasio tersebut dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}(X_n) - \text{Realisasi Pendapatan}(X_{n-1})}{\text{Realisasi Pendapatan}(X_{n-1})} \times 100\%$$

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kinerja keuangan pada indikator kesejahteraan masyarakat yang sudah dijabarkan, peneliti berpacu pada LKPD sebagai dasar pengukuran penelitian. Dengan melihat seberapa besar alokasi biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang pada setiap indikator dari tahun 2020- 2022. Selain itu, untuk

melihat apakah ada dampak atas pengalokasian biaya yang telah dikeluarkan, peneliti menggunakan data berikut pada masing-masing indikator :

a. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan terdiri atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ketiga indikator tersebut saling berhubungan, TPAK menggambarkan persentase penduduk yang memiliki pekerjaan sehingga tergolong sebagai angkatan kerja. Sedangkan, untuk mengetahui persentase penduduk yang merupakan pengangguran atau yang tidak terserap oleh pasar dapat dilihat melalui TPT. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data TPT yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Pemerintah Kota Tangerang.

b. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah dapat diketahui menggunakan indikator kemiskinan, salah satunya Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) sebagai bahan evaluasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain IKK, Peneliti juga menggunakan data Persentase Penduduk Miskin tahun 2018 – 2022 untuk penelitian ini.

c. Pendidikan

Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat melalui tingkat kemampuan membaca dan menulis (angka melek huruf) penduduk dan kualitas pelayanan pendidikan. Peningkatan mutu layanan pendidikan sudah seharusnya menjadi program utama pemerintah guna mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pendidikan adalah rasio murid-guru.

d. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa indikator penting yang peneliti gunakan dalam mendapat gambaran kondisi kesehatan suatu daerah yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan dan angka kesakitan penduduk (morbiditas).

D. Teknik Analisis

Djaali (2020), menyatakan bahwa teknis analisis data ialah kegiatan yang dilakukan dengan merepresentasikan data yang telah diperoleh sesuai dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis kuantitatif deskriptif yang menetapkan konsep perhitungan rasio keuangan sebagai ukuran kinerja

keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2018 – 2022. Analisis deskriptif merupakan jenis analisis yang ditujukan untuk merepresentasi atau menyajikan keadaan atau karakteristik data pada masing-masing variabel penelitian (Sugiyono, 2021).

Adapun proses perencanaan, cara menginterpretasikan data, hingga pembuatan kesimpulan untuk menganalisis data penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Melakukan penelusuran data atas dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Menghitung rasio keuangan daerah Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan.
3. Mendeskripsikan serta menginterpretasikan data berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan daerah mengacu pada kriteria dari masing-masing rasio.
4. Melakukan analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kesejahteraan masyarakat, mengacu pada beberapa indikator.
5. Membuat kesimpulan penelitian terkait dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.